

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS
SOSIAL KABUPATEN ENDE**

Oleh

- 1) Yuliana Chamsentya Aos
Mahasiswa Program Studi Akuntansi
e-mail:
- 2) Hermanus Reo
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail: hermanreo1970@gmail.com
- 3) Iriany Dewi Soleiman
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail:

Abstract

Each Regional Work Unit (SKPD) carries out accounting for economic transactions that occur on its part, to produce financial reports. The purpose of this study was to analyze the suitability of SKPD financial recording and reporting in Ende Regency, especially the Social Service with Permendagri Number 21 of 2011 and Government Regulation Number 71 of 2010.

This research uses descriptive qualitative. This writing uses data collection techniques, namely field studies and literature studies.

The results showed that the Social Service of Ende Regency had not kept records in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning Guidelines for Regional Financial Management related to a recording error in the ledger, namely the employee expenditure ledger, which should have been recorded at IDR 1,878,849,154 but it was recorded at IDR 1,878. .938,674 and there are still obstacles, namely limited human resources in carrying out activities according to their fields and still lack of technical support facilities and infrastructure for activities.

Keywords: Analysis, Recording, Reporting, SKPD, Ende District Social Service

1. Pendahuluan

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam menjalankan suatu organisasi. Melalui pencatatan dan pelaporan, akan tergambar jelas aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pemerintahan sebagai organisasi publik

juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas yang terjadi di pemerintahan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menggambarkan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pembangunan sarana dan prasarana yang akan dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Masyarakat dalam hal ini dituntut ikut ambil bagian untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Untuk mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, dapat diandalkan dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA) (Mahmudi, 2010).

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dalam kenyataannya masih ada kendala dalam pembenahan pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Ende, salah satunya Dinas Sosial.

Dinas Sosial sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 wajib menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Tujuan penggunaan basis akrual adalah untuk memberikan informasi yang lebih akrual dalam pelaporan keuangan yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal dan manajemen aset, meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja, dan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Perubahan tersebut bukanlah hal yang mudah dan cukup menjadi tantangan serta kesulitan tersendiri dalam pelaksanaannya mengingat dukungan untuk dapat mewujudkan diperlukan berbagai hal mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, komitmen dan konsistensi tertib penatausahaan dan pelaksanaan oleh jajaran pengelola keuangan pada SKPD. Jika sebelumnya penyajian laporan keuangan berbasis kas pencatatan dengan *single entry* rekening tandingan atas semua pengeluaran atau penerimaan adalah kas, maka dengan adanya perubahan sistem menjadi akrual, proses pengakuan dan pencatatan mengalami perubahan yang cukup signifikan pada basis kas pengakuan dan pencatatan keterjadian transaksi berdasar hanya mengandalkan pada saat kas masuk atau kas keluar, maka pada basis akrual pengakuan pencatatan adanya beban dan hak (pendapatan) tidak hanya memperhatikan pada saat kas diterima atau dibayar oleh bendahara pengeluaran atau kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) namun pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan diakui.

Dinas Pehubungan Kota Manado sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemeritahan kota Manado sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dari uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Rencana pemecahan masalah apakah Dinas Sosial Kabupaten Ende telah melakukan pencatatan Laporan Keuangan dan melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai acuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Dinas Sosial telah melakukan pencatatan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai acuan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pencatatan adalah proses memasukan data ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui *keyboard*, penggunaan *pointer mouse*, alat *scanner* (pembaca gambar), atau kamera video. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer (Witarto, 2008).

Munawir (2004:2) mengemukakan pengertian laporan keuangan adalah Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisiensi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten / Kota saja. Tetapi, dalam peraturan pemerintah dalam negeri itupun disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasi dengan Bagian Keuangan.

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tentang akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 (pasal 241-264) mengatur tentang prosedur akuntansi SKPD yaitu meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dapat secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Selain itu juga mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas. Kegiatan

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE - YULIANA CHAMSENTYA AOS, HERMANUS REO, IRIANY DEWI SOLEIMAN

akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara di SKPD. PPK-SKPD memiliki tugas berikut :

- a. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait.
- b. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing.
- c. Membuat Laporan Keuangan, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bendahara di SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus Akuntansi adalah tahap-tahap yang dalam sistem akuntansi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Analisis Transaksi
- b. Jurnal
- c. Posting ke Buku Besar
- d. Neraca Saldo
- e. Jurnal Penyesuaian
- f. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
- g. Laporan Keuangan:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca
 3. Laporan Operasional
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Jurnal Penutup

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ende Jl. Melati No. 62. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami data dan mengolah hasil penelitian berupa pencatatan dan laporan keuangan pada Dinas Sosial tahun 2015.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

a. Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende selama Tahun Anggaran bersangkutan. Karena Dinas Sosial merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tidak ada pencatatan terhadap pendapatan, sehingga tidak ada bendahara penerimaan pada Dinas Sosial Kabupaten Ende. Transaksi penerimaan kas hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu penerimaan kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ende selama Tahun Anggaran bersangkutan.

b. Beban

Belanja terbagi dari 2 jenis yaitu

1. Belanja Operasi

- a) Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri.
- b) Belanja barang merupakan pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa.

Dalam belanja pegawai terdapat masalah terkait pencatatan pada buku besar belanja pegawai yang seharusnya dicatat sebesar Rp 1.878.849.154 tetapi dicatat sebesar Rp 1.878.938.674. Hal ini akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Belanja Modal

Belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin (aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung, meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain sebagainya.

c. Aset

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende, yaitu berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

d. Jurnal

Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut akuntansi belanja (pengeluaran kas) dan akuntansi asset.

e. Posting Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, langkah selanjutnya PPK-BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing. Posting dilakukan secara periodik.

f. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, maupun untuk aset tetap lainnya

g. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca Saldo dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian tidak dibuat secara terpisah oleh PPK-BKD tetapi hanya dalam kertas kerja (worksheet), dan dari kertas kerja tersebutlah PPK-BKD menyusun Laporan Keuangan.

h. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh PPK- Dinas Sosial Kabupaten Ende terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Kas

Berdasarkan data penelitian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial tahun anggaran 2015 hanya berupa Belanja. Total realisasi belanja untuk tahun 2015 yang seharusnya adalah Rp 5.358.187.014 atau mencapai 95,53% dari total belanja yang dianggarkan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp 5.608.915.375,

sehingga terdapat Surplus/(Defisit) tahun anggaran 2015 yang seharusnya sebesar Rp 250.678.361. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

- a) Belanja pegawai Rp 1.878.849.154 (96,75%)
- b) Belanja barang dan jasa Rp 3.341.546.350 (89,27)
- c) Belanja modal Rp 137.841.500 (88,38)

2. Neraca

Berdasarkan data penelitian, Neraca Dinas Sosial tahun anggaran 2015 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebesar Rp 2.383.544.031 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 825.000, Aset Tetap sebesar Rp 2.235.342.950 dan Aset Lainnya sebesar Rp 148.201.081. Sedangkan Ekuitas dana yakni Ekuitas Dana Investasi yang dimiliki adalah sebesar Rp 2.384.369.031.

3. Laporan Operasional

Berdasarkan data penelitian, Laporan Operasional tahun 2015 berupa beban yaitu beban operasi sebesar Rp 5.219.660.034

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan data penelitian, Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015 sebesar 2.973.957.503 (defisit) berupa ekuitas awal sebesar Rp 2.245.702.531, Surplus / (Defisit-LO) sebesar Rp 5.219.660.034.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data penelitian, Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2015 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi sebagai berikut Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.

4.2 Pembahasan

Pencatatan laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Ende belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, dalam belanja pegawai terdapat masalah terkait pencatatan pada buku besar belanja pegawai yang seharusnya dicatat sebesar Rp

1.878.849.154 tetapi dicatat sebesar Rp 1.878.938.674. Hal ini akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan Perlu adanya sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Ende yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM) yang sudah ada.

Dinas Sosial Kabupaten Ende perlu adanya peningkatan terkait sarana yaitu kebutuhan kantor berupa ATK dan prasarana berupa fasilitas kantor untuk penunjang teknis kegiatan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh pada Dinas Sosial Kabupaten Ende mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Sosial yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Ende belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terkait kesalahan pencatatan pada buku besar yakni buku besar belanja pegawai yang seharusnya dicatat sebesar Rp 1.878.849.154 tetapi dicatat sebesar Rp 1.878.938.674
2. Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Ende Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

1. Untuk tahun anggaran selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam pengelolaan keuangan daerah harus teliti melakukan pencatatan dan pelaporan keuangannya

sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan pencatatan, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Ende yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM) yang sudah ada.
3. Dinas Sosial Kabupaten Ende perlu adanya peningkatan terkait sarana yaitu kebutuhan kantor berupa ATK dan prasarana berupa fasilitas kantor untuk penunjang teknis kegiatan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukkan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi akuntansi.

Daftar Pustaka

- Fauziah. 2011. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Eralngga PT. Gelora Aksara Pratama
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Munawir. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketigabelas, Yogyakarta : Liberty
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penulisan Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Perss

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE - YULIANA CHAMSENTYA AOS, HERMANUS REO, IRIANY DEWI SOLEIMAN

- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005* Tentang Pengelolaan Keuangan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011* Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013* Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Jakarta.
- Riduwan.2009. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rantung, Veronika. 2013. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado.
- Sinulingga, Sukaria. 2001. *Metode Penelitian*. Medan : USU Perss
- Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report : an Accountability Medium. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms*, Dublin
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas
- UU RI. 2014. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014* tentang Pemerintah Daerah.
- UU RI. 2004. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004* tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- Wibowo, 2002. *Pengantar Akuntansi I*. PT. Grasindo : Jakarta
- Wirtato, 2008. *Memahami Pencatatan Data*. <http://kuliahapsi.blogspot.com/2008-09-01-archive.html>. Diakses tanggal 16 Juni 2010.